

**Diplomasi Maritim  
Indonesia dalam  
Perumusan ASEAN  
Outlook on the Indo-Pacific**

Frequency of International Relations  
September, Vol 3 (2) 44-70  
© The Author(s)  
fetrian.fisip.unand.ac.id  
Submission track :  
Submitted : February 08, 2021  
Accepted : April 12, 2022  
Available On-line : May 16, 2022

**Luna Khoirunissa**

Program Studi Hubungan Internasional, FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur  
lunakhoirunnisa28@gmail.com

**Maria Indira Aryani**

Program Studi Hubungan Internasional, FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur  
maria.indira\_hi@upnjatim.ac.id

**Abstract**

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) is an Indo-Pacific cooperation framework established by ASEAN on June 2019. Indonesia was one of the founding fathers of ASEAN—known for its contributions as a inisiator of many cooperations and collaborations in the region—is also known for its great contributions in constructing the AOIP framework. Therefore, this paper aims at explaining about Indonesia’s maritime diplomacy took part in formulating the AOIP through the ASEAN internal forums and the ASEAN mechanisms. This paper uses maritime diplomacy concept as its main analytical tools, consisting of three main diplomatic activities, which are cooperative maritime diplomacy, persuasive maritime diplomacy and coercive maritime diplomacy. This paper also uses qualitative methods with descriptive approach, and primary data derived from an interview with a diplomat of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs and secondary datas were collected from various literatures and news. This article concludes that Indonesia’s diplomacy effort in support of AOIP is done under the cooperative maritime diplomacy framework by emphasizing the urgency to build an ASEAN-based Indo-Pacific cooperation concept amidst the emerging Indo-Pacific frameworks and visions pointed out by the great powers in the Indo-Pacific regions. This paper is conducted from 2014, where President Jokowi announce the maritime fulcrum foreign policy, to 2019 where the AOIP was established.

**Keywords:** AOIP, Cooperative Maritime Diplomacy, Indonesia, ASEAN

## Pendahuluan

Kawasan Indo-Pasifik merupakan salah satu kawasan yang sedang menjadi “incaran” negara-negara besar karena letaknya yang strategis. Di kawasan Indo-Pasifik terdapat belasan hingga puluhan negara yang ada di dalamnya. Beberapa aktor yang terlibat di kawasan Indo-Pasifik adalah negara-negara besar, seperti Tiongkok, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Negara-negara besar tersebut kemudian berkompetisi untuk memainkan perannya dan menyebarkan pengaruhnya di kawasan. Beberapa konsep kerja sama pun telah dikembangkan, seperti proyek Belt Road Initiatives milik Tiongkok yang akan menggunakan beberapa wilayah di kawasan Indo-Pasifik sebagai jalur perdagangan utama milik Tiongkok serta Free and Open Indo-Pacific yang digagas oleh Amerika Serikat dan negara-negara pendukungnya seperti India, Jepang, dan Australia untuk menandingi strategi yang dimiliki Tiongkok.

Merespon hal tersebut, pada Juni 2019, ASEAN secara resmi mendeklarasikan pengembangan konsep kerja sama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific bagi negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Konsep ini ditengarai dikembangkan untuk mempertahankan idealisme ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara—yang juga merupakan bagian dari kawasan Indo-Pasifik. Konsep kerja sama AOIP ini mengedepankan sentralitas

ASEAN serta mengesampingkan rivalitas dan konflik antar negara yang tertuang dalam prinsip-prinsip AOIP; sentralitas, keterbukaan, transparan, inklusivitas, berbasis aturan/norma internasional, penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, saling melengkapi, dan kepemimpinan yang baik (ASEAN 2019). Lingkup kerja sama dari AOIP meliputi keamanan maritim, ekonomi biru, konektivitas, dan ekonomi. Adanya konsep Indo-Pasifik ini bersifat “reaktif” dan berasal dari Amerika Serikat beserta sekutunya untuk menandingi konsep Belt Road Initiative (BRI) milik Tiongkok (Herindrasti 2019).

Indonesia pada 2014 mulai mengarahkan kebijakan luar negerinya ke arah kekuatan maritim lewat pencaanangan visi Poros Maritim Dunia yang pertama kali digagas oleh Presiden Joko Widodo. Visi ini kemudian semakin diperkuat oleh adanya diplomasi maritim yang digalakkan oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya dimulai dengan pembawaan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang dimuat pada visi Kementerian Luar Negeri: “Terwujudnya Wibawa Diplomasi Guna Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim Untuk Kepentingan Rakyat” (Kementerian Luar Negeri RI 2019). Hal ini cukup membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk memaksimalkan potensi maritim yang dimiliki. Visi PMD ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

Pergeseran pandangan diplomasi Indonesia ke arah diplomasi maritim diawali dengan adanya gagasan PMD oleh Presiden Joko Widodo tahun 2014. Presiden Jokowi telah memutuskan beberapa hal, seperti: (1) mereformasi pandangan pertahanan nasional, (2) menaikkan anggaran pertahanan, (3) menggunakan platform kerja sama multilateral untuk bekerjasama dengan negara-negara besar, dan (4) berkontribusi secara aktif untuk membentuk sebuah institusi di Indo-Pasifik. (Agastia and Perwita 2015, 39) Diplomasi Maritim yang dilaksanakan oleh Indonesia menurut Rijal (2019) dituangkan melalui tiga hal, yakni diplomasi maritim kooperatif/kerja sama, diplomasi maritim koersif, dan diplomasi maritim persuasif (Rijal 2019, 74).

Terbentuknya konsep AOIP milik ASEAN sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk melaksanakan kepentingan maritimnya. Indonesia berpredikat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah total pulau sebanyak 17.504 (BPS 2017). Dengan luas lautan serta jumlah pulau banyak, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sumber daya kelautannya. Tercatat pada triwulan pertama tahun 2019, Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan Indonesia mencapai Rp 62,31 triliun (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut, muncullah sebuah pertanyaan yang kemudian menjadi rumusan masalah dari penelitian yang akan dikerjakan oleh penulis, yakni bagaimana diplomasi maritim Indonesia dalam perumusan konsep AOIP? Penulis berargumen bahwa Indonesia memiliki andil dalam perumusan AOIP lewat diplomasi maritim yang dijalankannya. Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan upaya yang dilakukan Indonesia melalui praktik-praktik diplomasi untuk mendukung terciptanya konsep kerja sama baru dalam rangkaian kerja sama internasional di lingkup ASEAN dengan jangka waktu penelitian tahun 2014-2019. Pemilihan jangkauan waktu penelitian ini berdasarkan pada waktu ketika dideklarasikannya PMD oleh Jokowi pada tahun 2014 hingga konsep AOIP resmi dideklarasikan oleh ASEAN pada tahun 2019.

### **Metode Penelitian**

Untuk melihat upaya Indonesia dalam perumusan AOIP, metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara dan riset internet dalam mengumpulkan data. Data yang digunakan oleh penulis dalam membuat esai ini adalah: (1) data primer yang didapat melalui wawancara langsung dengan diplomat Kementerian Luar Negeri RI dan akademisi Hubungan Internasional, (2) data sekunder yang

didapat melalui informasi dari berbagai literatur, surat kabar, dan media. Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari internet yang meliputi berita-berita dari kanal berita online seperti Tempo, Liputan6.com, Sindo News, press release dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara, dan laporan tahunan dari Kementerian Luar Negeri.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep Diplomasi Maritim oleh Christian Le Miere (2014). Diplomasi maritim merupakan sebuah bentuk pengelolaan hubungan internasional melalui wewenang kemaritiman (Miere 2014, 7) . Konsep diplomasi maritim tidak memiliki definisi yang pasti, namun konsep ini berbeda dengan gunboat diplomacy dan naval diplomacy. Konsep diplomasi maritim merupakan konsep yang menjelaskan berbagai kegiatan di wilayah maritim suatu negara yang aktor dan komponen utamanya bukan hanya militer, namun juga melibatkan berbagai aktor paramiliter. Diplomasi maritim dinilai lebih efektif dari gunboat diplomacy dan naval diplomacy mengingat kondisi dunia saat ini penuh dengan kemajuan teknologi serta mengedepankan aspek-aspek paramiliter.

Miere (2014) memetakan konsep diplomasi maritim menjadi tiga tipe aktivitas, yaitu: (1) diplomasi maritim kooperatif, (2) diplomasi maritim persuasif, dan (3) diplomasi maritim koersif.

Diplomasi maritim kooperatif adalah diplomasi maritim yang dilakukan oleh suatu negara dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Aktivitas dalam diplomasi maritim kooperatif mencakup berbagai kegiatan seperti pertukaran informasi, latihan gabungan, pengadaan bantuan bencana alam, dan kunjungan. Diplomasi maritim kooperatif ini dapat juga disebut sebagai diplomasi maritim secara halus (*soft maritime diplomacy*). Berbagai aktivitas diplomasi maritim kooperatif ini berujung pada terbentuknya *confidence-building measures*.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mendapatkan pengaruh dan pengakuan atas kekuatan maritim yang dimilikinya dilaksanakan melalui diplomasi maritim persuasif. Menurut Miere (2014), diplomasi maritim persuasif bertujuan untuk membentuk konstruksi pemikiran atas eksistensi dan kapabilitas suatu negara tanpa berupaya untuk mempengaruhi kebijakan negara lain. Diplomasi maritim persuasif dilakukan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat menunjukkan identitas dari sebuah negara. Diplomasi maritim persuasif merupakan cara bagi suatu negara untuk meningkatkan gengsi serta pengakuan dari negara lain tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang bersifat koersif dan intimidatif.

Bentuk terakhir dari diplomasi maritim adalah diplomasi maritim koersif. Diplomasi maritim koersif seringkali disamakan dengan gunboat diplomacy. Diplomasi maritim koersif dilakukan dengan tindakan-tindakan yang represif dan seringkali berujung pada konfrontasi, salah satunya adalah menggunakan kekuatan militer seperti kapal perang. Kekuatan militer yang digunakan bertujuan untuk memberikan ancaman kepada pihak lawan sehingga dapat merubah kebijakan lawan maupun memaksa lawan untuk bertindak seperti yang diharapkan oleh suatu negara.

## **Hasil**

### **Indonesia dan Poros Maritim Dunia**

Gagasan tentang PMD diperkenalkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014. Beberapa bulan setelah gagasan PMD dideklarasikan oleh Jokowi secara domestik setelah pelantikannya sebagai presiden, Indonesia kemudian mendeklarasikan doktrin PMD ini pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 13 November 2014 (detikNews 2014). Pada rangkaian pertemuan tingkat tinggi tersebut, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam bidang kemaritiman (Liputan6 2014). Dalam KTT tersebut, Jokowi mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk segera melakukan implementasi Master Plan on ASEAN

Connectivity—yang di dalamnya terdapat Physical Connectivity—dalam perencanaan peningkatan konektivitas dalam pengadaan infrastruktur maritim. Jokowi juga membahas pentingnya penghormatan kedaulatan masing-masing negara dan penyelesaian isu Laut Cina Selatan dengan menjunjung perdamaian.

Gagasan ini merupakan proyek ambisius Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan maritim dunia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia tentunya memiliki berbagai isu maritim seperti pelanggaran wilayah perairan zona ekonomi eksklusif, sengketa teritorial dengan negara tetangga, perdagangan ilegal, hingga permasalahan lingkungan. PMD digagas untuk menangani masalah-masalah dan isu-isu terkait perairan Indonesia. Dengan adanya PMD, pemerintah Indonesia pada akhirnya dituntut untuk lebih memperhatikan wilayah perairannya yang kemudian membuat Pemerintah Indonesia memperkuat unsur-unsur kemaritimannya.

Diplomasi maritim pada era pemerintahan Jokowi diawali dengan adanya gagasan mengenai Poros Maritim Dunia (PMD). Perlu dipahami bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam gagasan ini, yakni: poros maritim dan dunia (Suropati, 2016 dalam (Rijal 2019)). Kedua hal ini memberi arti bahwa status sebagai poros maritim yang ingin dicapai oleh Indonesia tidak hanya dalam lingkup regional, namun dunia internasional. Untuk meraih hal tersebut, Indonesia

perlu mengadakan diplomasi maritim dan berbagai peningkatan kapasitas serta kapabilitas maritim yang dimilikinya. Terdapat lima pilar utama dalam mewujudkan gagasan Poros Maritim Dunia, yaitu: pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus menempatkan nelayan sebagai pilar utama; komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim; diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan; dan membangun kekuatan pertahanan maritim (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 2016).

Selain lima pilar tersebut, Indonesia perlu untuk mengadakan sinkronisasi terkait proyek ini dalam kebijakan politik domestiknya terlebih dahulu. Presiden Joko Widodo telah memutuskan beberapa hal seperti mereformasi pandangan pertahanan nasional, menaikkan anggaran pertahanan, menggunakan platform kerja sama multilateral untuk bekerjasama dengan negara-negara besar, dan berkontribusi secara aktif untuk membentuk sebuah institusi di Indo-Pasifik (Agastia and Perwita 2015, 39). Pada 2014, Presiden Joko Widodo juga telah berencana untuk meningkatkan anggaran pertahanan sebesar

1,5 persen yang akan dialokasikan untuk pengadaan alutsista dan membangun infrastruktur maritim.

Peningkatan anggaran tersebut berbuah hasil. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada tahun 2014 menyatakan bahwa Indonesia berencana untuk membangun pangkalan militer baru di Kepulauan Natuna untuk memperkuat kekuatan militer Indonesia di wilayah perbatasan dengan Laut Cina Selatan tersebut (Tempo 2014). Pada Desember 2018 lalu, TNI meresmikan pangkalan militer barunya di Laut Cina Selatan, tepatnya di Pulau Natuna Besar. Diresmikannya pangkalan militer di Laut Cina Selatan menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi perairan Indonesia dari ancaman pelanggaran teritorial.

Selain pertahanan, Indonesia juga meningkatkan pembangunan infrastrukturnya. Dalam periode 2015-2018, pemerintahan Joko Widodo telah membangun 27 pelabuhan baru. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas domestik Indonesia dan untuk menunjang tercapainya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia juga memperkuat diplomasinya di dunia internasional sebagai poros maritim dunia melalui diplomasi maritim.

### **Kerjasama Maritim Indonesia di ASEAN**

Gagasan tentang poros maritim dunia ini kemudian menjadi sebuah landasan politik luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi. Pandangan politik luar negeri era Jokowi yang tertuju pada kemaritiman ini tentunya tidak lepas dari atribut nasional Indonesia yang merupakan negara maritim dan berpegang teguh pada nilai-nilai perdamaian dan pencapaian kepentingan melalui kerjasama. Fokus politik luar negeri Indonesia terhadap kemaritiman membuat Indonesia berperan lebih aktif dalam berbagai kerja sama dalam bidang maritim di regional.

Setelah mengumumkan gagasan PMD, Indonesia kemudian mulai mendorong terciptanya kerja sama di bidang maritim di berbagai forum tingkat regional melalui diplomasi maritimnya. Indonesia menjadi tuan rumah bagi berbagai konferensi internasional mengenai kemaritiman. Pada periode 2015-2017, Indonesia memegang keketuaan dari Indian Ocean Rim Association (IORA). Dalam masa keketuaannya, Indonesia mengusung tema KTT yang berlangsung pada 5-7 Maret 2017 di Jakarta tersebut mengusung tema “Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful, Stable & Prosperous Indian Ocean”. Selama menjabat sebagai ketua, Indonesia merupakan pemrakarsa adanya dua hal di IORA: (1) pelaksanaan KTT pertama dari IORA di Jakarta; dan (2) pembentukan IORA Concord

sebagai outcome strategis 20 tahun IORA (Kementerian Luar Negeri RI 2019).

Pada masa keketuaannya, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan lima program kegiatan dengan berkolaborasi dengan Kementerian dan lembaga terkait yang ada di Indonesia, yaitu: (i) The 3rd Indian Ocean Dialogue; (ii) International Symposium "IORA 20th Anniversary: Learning from Past and Charting the Future"; (iii) IORA Business Innovation Center (BIC); (iv) IORA Guide for Investment; (v) The 2nd Blue Economy Conference; (vi) Regional Workshop: "Interseksi Kebudayaan dan Peradaban di Samudera Hindia"; dan (vii) IORAG Cultural Expo (Kementerian Luar Negeri RI 2019). Keketuaan Indonesia di IORA ini menurut penulis merupakan langkah strategis dalam menjalankan diplomasi maritimnya karena IORA merupakan organisasi antarpemerintah pertama dan satu-satunya di kawasan Samudera Hindia yang mana keanggotaannya lebih luas dari ASEAN. Dengan menjadi ketua IORA pada periode tersebut, Indonesia memiliki bargaining power untuk mempengaruhi atau meyakinkan negara anggota lainnya untuk mencapai kepentingan bersama di bawah IORA—yang mana hal tersebut selaras dengan diplomasi maritim kooperatif yang dilaksanakan Indonesia.

Pada tahun 2015, EAS Leaders' Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation disahkan atas inisiatif yang diajukan

Indonesia pada KTT EAS di Kuala Lumpur. Presiden Jokowi juga mendorong isu terkait kerja sama maritim sebagai prioritas utama dalam kerja sama EAS (Sekretariat Kabinet RI 2015). Kemudian pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah dari Our Ocean Conference (OOC) yang ke-5. Konferensi yang digelar di Bali ini memiliki enam bidang aksi terkait kelautan, yaitu ekonomi biru berkelanjutan, perubahan iklim, pencemaran laut, kawasan lindung laut, perikanan berkelanjutan, dan keamanan maritim (Kominfo 2018). Enam bidang aksi yang dibahas dalam konferensi ini juga merupakan isu-isu yang dapat menunjang kepentingan Indonesia dalam memperkuat serta memaksimalkan potensi kemaritimannya. Tentunya, penyelenggaraan OOC tersebut dapat menjadi ajang untuk menunjukkan keunggulan Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan dan ancaman terhadap laut Indonesia.

Pada tahun yang sama, Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan IORA High Level Panel on Enhancing Maritime Cooperation for Inclusive Growth. Pertemuan ini diadakan sebagai bentuk implementasi dari Jakarta Concorde dan Plan of Action 2017-2021 yang telah disusun pada kepemimpinan Indonesia tahun 2017. Selain itu, Indonesia juga memprakarsai disahkannya EAS Leaders' Statement on Combating Marine Plastic Debris pada KTT EAS di Singapura (Antaraneews.com 2019). Dalam penanganan isu tersebut,

Indonesia telah terlebih dahulu menerbitkan Indonesia's Plan of Action on Marine Plastic Debris 2017-2021 pada tahun 2017.

Berbagai aktivitas dan kerja sama di bidang maritim yang dilakukan oleh Indonesia merupakan bentuk diplomasi maritim kooperatif Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai negara maritim di kawasan dan selaras dengan semangat PMD dan pilar-pilarnya. Indonesia beberapa kali menginisiasi berbagai perjanjian kerja sama maritim serta menjadi tuan rumah bagi konferensi yang membahas isu maritim. Hal ini merupakan bentuk diplomasi maritim Indonesia yang selaras dengan kepentingannya sebagai poros maritim dunia. Sebagai middle power, Indonesia menggunakan diplomasi maritim kooperatif yang mengedepankan negosiasi dan kerja sama dibandingkan dengan diplomasi maritim koersif yang menggunakan kekuatan militer dalam mencapai kepentingan.

### **Pentingnya AOIP bagi Indonesia dan ASEAN**

AOIP memiliki arti penting bagi ASEAN dan negara-negara anggotanya. Sebagai regional yang menjunjung stabilitas dan perdamaian yang terletak di jantung kawasan Indo-Pasifik, ASEAN harus memiliki strategi kerja sama Indo-Pasifik miliknya sendiri agar tidak terlibat dalam rivalitas dan konflik antara pihak-pihak mana pun. Selain itu, dengan memiliki pandangan sendiri terkait Indo-Pasifik, negara-negara anggota ASEAN akan lebih menomorsatukan

kepentingan ASEAN dibandingkan kepentingan negara-negara besar lainnya. Keberpihakan pada blok dan pihak manapun juga akan dapat dihindarkan dengan adanya AOIP yang menyertakan sentralitas ASEAN di dalamnya. AOIP mewakili kepentingan dan identitas ASEAN di tengah banyaknya narasi dan konsep-konsep lain mengenai Indo-Pasifik. AOIP juga memperkuat prinsip-prinsip dan kedudukan ASEAN dalam berbagai forum dan kerja sama dengan negara-negara besar yang memiliki visi dan kepentingan di Indo-Pasifik (Ha 2019, 6).

Adanya AOIP juga bermakna penting bagi Indonesia. AOIP merupakan konsep yang digagas dan ‘diperjuangkan’ oleh Indonesia pada meja perundingan ASEAN. AOIP dapat dinilai sebagai salah satu bentuk dari diplomasi maritim Indonesia dalam mewujudkan PMD. Adanya konektivitas dalam kerja sama AOIP membuat agenda kepentingan ekonomi Indonesia terjembatani. Salah satu contohnya adalah lebih mudahnya perdagangan kelapa dari Aceh ke Pulau Andaman dan Nikobar milik India.

Selain itu, AOIP merupakan suatu bukti peran aktif dan pengaruh Indonesia di ASEAN. Indonesia memang dikenal berperan aktif di ASEAN, salah satunya sebagai founding fathers of ASEAN. Menurut Siahaan (2020), sumbangsih Indonesia cukup besar di ASEAN bahkan Indonesia seringkali dipandang sebagai informal leader of ASEAN. Dalam pilar politik saja, Indonesia seringkali

berpartisipasi aktif yang pada akhirnya dapat memberikan output terhadap ASEAN, seperti partisipasi Indonesia dalam mediasi konflik di Kamboja (Siahaan 2020).

Sedangkan, disepakatinya AOIP yang notabene merupakan gagasan dan inisiatif dari Indonesia dapat dinilai sebagai bentuk dominasi dan pengaruh Indonesia yang cukup kuat di ASEAN. Argumen tentang pengaruh Indonesia di ASEAN didukung oleh rangkaian peristiwa sejarah Indonesia dengan ASEAN. ASEAN dapat dengan sukses terbentuk akibat perubahan arah politik Indonesia yang pada saat itu beralih dari kepemimpinan Sukarno—yang condong ke arah komunis—ke Suharto yang beraliran kanan. Sebelum membentuk ASEAN, Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Filipina telah beberapa kali membentuk organisasi regional seperti Association of Southeast Asia (ASA)—yang tidak pernah benar-benar berdiri—dan Malindo yang bubar akibat konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia (Anwar 2006). ASEAN akhirnya berdiri dengan dukungan penuh dari Indonesia yang pada saat itu di bawah kepemimpinan Suharto dengan kebijakan luar negeri yang lebih ‘ramah’ dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dan partisipasi Indonesia sangat berpengaruh bagi adanya kerja sama regional dalam bentuk ASEAN.

## **Diskusi dan Analisis**

### **Upaya Diplomasi Maritim Indonesia pada Proses Perumusan AOIP**

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif merasa bahwa keberpihakan tertentu dalam politik internasional dapat diminimalisir dengan adanya inklusivitas dalam kerja sama internasional. Konsep kerja sama Indo-Pasifik bukanlah merupakan sebuah konsep baru. Namun, ASEAN yang merupakan kawasan yang berada di wilayah Indo-Pasifik hingga awal tahun 2019 belum memiliki landasan strategi dan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Dengan berbagai strategi mengenai Indo-Pasifik yang dicanangkan oleh negara-negara besar seperti Cina dan Amerika Serikat beserta aliansinya, Indonesia merasa bahwa ASEAN perlu untuk memiliki strategi dan pandangannya sendiri mengenai Indo-Pasifik, sehingga pandangan tersebut dapat menjadi landasan kerja sama di masa mendatang dengan mitra wicaranya tanpa perlu untuk condong kepada golongan manapun karena kerja sama tersebut akan berdasarkan prinsip ASEAN sendiri, yang saat ini telah berbentuk AOIP. Akhirnya, ASEAN meluncurkan sebuah konsep mengenai Indo-Pasifik yang bertajuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada pertengahan 2019. AOIP memiliki empat elemen penting yang dipaparkan dalam dokumen final paper AOIP:

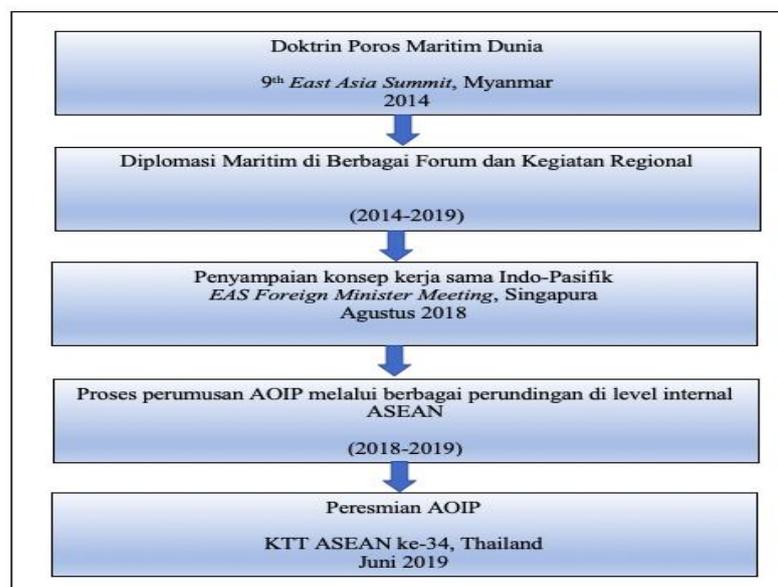
A perspective of viewing the Asia-Pacific and Indian Ocean regions, not as contiguous territorial spaces but as a closely integrated and interconnected region, with ASEAN playing a central and strategic role; An Indo-Pacific region of dialogue and cooperation instead of rivalry; An Indo-Pacific region of development and prosperity for all; The importance of the maritime domain and perspective in the evolving regional architecture

Upaya Indonesia dalam perumusan AOIP dimulai ketika Indonesia pertama kali memaparkan sebuah konsep Indo-Pasifik pada rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-51 dan Post Ministerial Conference ke-19 pada bulan Agustus 2018. Konsep ini adalah embrio dari konsep AOIP yang secara resmi diluncurkan setahun kemudian. Dalam rangkaian pertemuan ini, Menlu Retno Marsudi menjelaskan bahwa Indonesia telah melakukan beberapa langkah, yakni konsultasi dengan negara anggota ASEAN lainnya hingga lobbying mengenai konsep Indo-Pasifik ini (Agusti 2018) . Konsep Indo-Pasifik yang diusung oleh Indonesia ini mengedepankan sentralitas ASEAN dalam implementasinya.

Satu bulan setelah memperkenalkan konsep Indo-Pasifik, Indonesia berinisiatif untuk menyelenggarakan Pertemuan Retreat Pejabat Senior ASEAN atau ASEAN SOM Retreat yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 September 2018. Melalui pertemuan ini, Indonesia mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk

mengembangkan sebuah outlook dengan fokus kerja sama dalam bidang maritim, konektivitas, dan pembangunan berkelanjutan (Setnas ASEAN-Indonesia 2018) . Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mengembangkan konsep kerja sama Indo-Pasifik yang diusulkan oleh Indonesia. Pada bulan November 2018, konsep ini diperkenalkan langsung oleh Presiden Jokowi pada pertemuan 13th East Asia Summit di Singapura (Kantor Staf Presiden 2018).

Gambar 1. Upaya Indonesia dalam Perumusan AOIP



Namun, rupanya sebelum secara resmi memperkenalkan konsep Indo-Pasifik yang digagasnya, Indonesia terlebih dahulu mengadakan ASEAN 1.5 Track Workshop on an Indo-Pacific Regional Architecture for Mutually Beneficial Relations pada 20 Maret 2018, atau lima bulan sebelum Menlu Retno memperkenalkan konsep Indo-

Pasifik di Pertemuan Menlu ASEAN. Workshop yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri RI tersebut dihadiri oleh beberapa pembicara, yakni dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam serta mendatangkan pakar/akademisi dari think-tank seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (Setnas ASEAN-Indonesia 2018). Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pentingnya kerja sama yang konkrit karena sistem internasional sedang mengalami perubahan terkait negara-negara yang berkuasa.

Pada bulan Maret 2019, Jakarta kembali menyelenggarakan High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation. Forum ini bertujuan sebagai wadah dialog untuk memperdalam dan memperluas kerja sama di kawasan Indo-Pasifik (Kementerian Luar Negeri RI n.d.). Konsep Indo-Pasifik yang digagas Indonesia pada akhirnya resmi disepakati oleh ASEAN pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok pada 23 Juni 2019. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kerja sama dari AOIP mencakup keamanan maritim, ekonomi biru, konektivitas, dan ekonomi. AOIP bukanlah suatu mekanisme kerja sama baru yang dapat menggeser mekanisme kerja sama sebelumnya, namun merupakan sebuah landasan bagi kerja sama Indo-Pasifik dengan memanfaatkan dan memperkuat mekanisme yang telah ada sebelumnya, terlebih East Asia Summit (EAS).

Indonesia tidak hanya aktif dalam perumusan AOIP, namun juga aktif untuk mengembangkan dan mengimplementasi strategi kerja sama AOIP dalam berbagai kesempatan. Pada ASEAN Maritime Forum (AMF) ke-9 dan Expanded-ASEAN Maritime Forum (EAMF) ke-7 tahun 2019, Indonesia berinisiatif untuk mengadakan ASEAN-WEF on Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum di Jakarta pada Juli 2020 mendatang (Setnas ASEAN-Indonesia 2019). Seperti namanya, diadakannya forum ini merupakan suatu bentuk implementasi dari AOIP dalam bidang kerja sama konektivitas.

Indonesia juga memiliki beberapa inisiatif terkait bidang keamanan maritim. Pada Januari 2019, Indonesia meresmikan Indonesia Maritime Information Center (IMIC) yang dioperasikan oleh Angkatan Laut RI. IMIC milik Indonesia ini akan menjadi sebuah pusat pertukaran informasi tentang kemaritiman pada tingkat nasional, regional, dan internasional (Setnas ASEAN-Indonesia 2019). IMIC merupakan bentuk sinergi antara kementerian dan lembaga dalam menangani isu-isu kelautan Indonesia. Adanya integrasi di bidang informasi maritim akan memperkuat wilayah maritim Indonesia dari berbagai permasalahan seperti pembajakan, perdagangan ilegal, dan IUU fishing.

Selain itu, dalam rangka penguatan kerja sama di bidang keamanan maritim, Indonesia telah berpartisipasi untuk menyelenggarakan EAMF Workshop on State Response Management

on the Prevention and Preparedness against Transboundary Marine Pollution di Jakarta pada 29-30 Agustus 2019 (Setnas ASEAN-Indonesia 2019). Sedangkan dalam bidang ekonomi dan ekonomi biru, Indonesia terus menggalakkan implementasi dari Marine Plastic Debris yang telah dikampanyekan sejak tahun 2015 oleh Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI 2019).

Dari paparan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai upaya intensif yang mendukung tercapainya AOIP. Hal ini senada dengan pernyataan dari Direktur Direktorat Kerja Sama Eksternal ASEAN, Benny Y.P. Siahaan. Dalam wawancara secara langsung, beliau menyatakan bahwa Indonesia merupakan pembuat draft pertama dari konsep kerja sama Indo-Pasifik di tataran ASEAN. Beliau juga menambahkan bahwa seringkali, AOIP disebut sebagai konsep ‘milik’ Indonesia karena sejak awal Indonesia merupakan penggagas dan pendorong aktif adanya outlook ini.

### **Kesimpulan**

Sejak 53 tahun bergabung menjadi anggota ASEAN sekaligus menjadi founding fathers ASEAN, Indonesia selalu berperan aktif dalam kerja sama regional dan seringkali menjadi inisiator berbagai kerja sama di ASEAN, salah satunya adalah AOIP. AOIP memiliki arti penting bagi ASEAN, negara-negara ASEAN, dan juga Indonesia. Bagi

ASEAN, AOIP sangatlah penting sebagai sebuah strategi dan pandangan kolektif negara-negara anggota ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik untuk menghindari adanya kecenderungan untuk berpihak kepada negara-negara besar yang ada di Indo-Pasifik. Sedangkan bagi Indonesia, AOIP merupakan sebuah langkah untuk melancarkan kepentingan-kepentingan Indonesia dalam mencapai tujuannya sebagai poros maritim dunia. Melihat pentingnya AOIP bagi Indonesia dan bagi ASEAN, Indonesia sebenarnya telah beberapa kali menekankan pentingnya kerja sama maritim di kawasan Indo-Pasifik, namun hal tersebut merupakan pondasi bagi inisiatif Indo-Pasifik Indonesia di tataran ASEAN. Baru setelah itu, pada tahun 2018 Indonesia secara resmi menyatakan inisiatifnya untuk pengembangan konsep Indo-Pasifik yang berdasarkan sentralitas ASEAN yang akhirnya berhasil diresmikan pada Juni 2019 lalu. Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai hal ini, terutama jika dilihat dari kerangka diplomasi maritim kooperatif dalam berbagai forum ASEAN. Indonesia berhasil mendorong dan melakukan lobbying kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menyetujui terbentuknya sebuah outlook kerja sama maritim di kawasan. Hingga saat ini, Indonesia masih berperan aktif dalam mendorong berbagai implementasi AOIP di berbagai kerja sama regional ASEAN.

## Referensi

Agastia, I Gusti Bagus Dharma, and A.A Banyu Perwita. 2015. "Jokowi's Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific." *Journal of ASEAN Studies* 3 (1): 32-41.

Antaraneews.com. 2019. Menlu sebut Indonesia konsisten perkuat diplomasi maritim. Januari 9. <https://www.antaraneews.com/berita/785453/menlu-sebut-indonesia-konsisten-perkuat-diplomasi-maritim>.

Anwar, Dewi Fortuna. 2006. "Leadership in the history of Southeast Asian integration: The role of Indonesia in ASEAN." In *Regional Integration in East Asia and Europe*, by Bertrand Fort and Douglas Webber, 59-68. Oxford: Routledge.

ASEAN. 2019. ASEAN. Juni 22. [https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific\\_FINAL\\_22062019.pdf](https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf).

Augesti, Afra. 2018. Paparkan Konsep Indo-Pasifik ke ASEAN, Menlu Retno Marsudi: Semua Dukung Sentralitas ASEAN. Agustus 8. <https://www.liputan6.com/global/read/3613657/paparkan-konsep-indo-pasifik-ke-asean-menlu-retno-marsudi-semua-dukung-sentralitas-asean>.

BPS. 2017. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016. November 21. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>.

DetikNews. 2014. Ini Doktrin Jokowi di East Asia Summit Tentang Poros Maritim Dunia. November 13. <https://news.detik.com/berita/d-2747254/ini-doktrin-jokowi-di-east-asia-summit-tentang-poros-maritim-dunia>.

Ha, Hoang Thi. 2019. "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Old Wine in New Bottle?" *Perspective*, June 25: 1-8.

Herindrasti, V.L. Sinta. 2019. "Fenomena Indo-Pasifik dan Diplomasi Indonesia." *Jurnal Asia Pacific Studies (Universitas Kristen Indonesia)* 3 (1): 43-51.

Kantor Staf Presiden. 2018. Presiden Jokowi Presentasikan Konsep Indo-Pasifik di EAS. November 15. <http://ksp.go.id/presiden-jokowi-presentasikan-konsep-indo-pasifik-di-eas/>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2019. KKP Catat Kinerja Positif di Semester Pertama 2019. Juli 5. <https://kkp.go.id/artikel/11774-kkp-catat-kinerja-positif-di-semester-pertama-2019>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2016. Menuju Poros Maritim Dunia. Oktober 18. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata).

Kementerian Luar Negeri RI. 2019. Indian Ocean Rim Association. April 8. [https://kemlu.go.id/portal/i/read/167/halaman\\_list\\_lainnya/indian-ocean-rim-association](https://kemlu.go.id/portal/i/read/167/halaman_list_lainnya/indian-ocean-rim-association).

Kementerian Luar Negeri RI. 2019. Penanganan Sampah Plastik Laut (Marine Plastic Debris). April 10. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/172/halaman\\_list\\_lainnya/penanganan-sampah-plastik-laut-marine-plastic-debris](https://kemlu.go.id/portal/id/read/172/halaman_list_lainnya/penanganan-sampah-plastik-laut-marine-plastic-debris).

Kementerian Luar Negeri RI. 2019. "Visi Kementerian Luar Negeri ." Kementerian Luar Negeri. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/17/halaman\\_list\\_lainnya/visi-kementerian-luar-negeri](https://kemlu.go.id/portal/id/read/17/halaman_list_lainnya/visi-kementerian-luar-negeri).

Kementerian Luar Negeri RI. n.d. What is the High Level Dialogue on Indo-Pacific? <https://hldipc.kemlu.go.id/author/954-superuser>.

Kominfo. 2018. Our Ocean Conference 2018, Wujudkan Kepemimpinan Indonesia di Sektor Kelautan Dan Perikanan. Oktober 31. [https://kominfo.go.id/content/detail/15223/our-ocean-conference-2018-wujudkan-kepemimpinan-indonesia-di-sektor-kelautan-dan-perikanan/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/15223/our-ocean-conference-2018-wujudkan-kepemimpinan-indonesia-di-sektor-kelautan-dan-perikanan/0/artikel_gpr).

Laksmiana, Evan. 2019. Why Indonesia's New Natuna Base Is Not About Deterring China. Januari 25. <https://amti.csis.org/indonesias-natuna-base-not-about-deterring-china/#:~:text=On%20December%2018%2C%20Indonesian%20military,deterrence%20effect%E2%80%9D%20against%20border%20threats>.

Liputan6. 2014. Hadiri KTT ASEAN Myanmar, Jokowi Kembali Ajak Kerja Sama Maritim. November 13. <https://www.liputan6.com/global/read/2133220/hadiri-ktt-asean-myanmar-jokowi-kembali-ajak-kerja-sama-maritim>.

Miere, Christian Le. 2014. Maritime Diplomacy in the 21st Century. Oxford: Routledge.

Rijal, Najamuddin Khairur. 2019. "Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia." *Global Strategis* 63-77.

Sekretariat Kabinet RI. 2015. Indonesia Successfully Inserting the Maritime Cooperation as a Priority in the East Asia Summit Sumber: <https://setkab.go.id/en/indonesia-successfully-inserting-the-maritime-cooperation-as-a-priority-in-the-east-asia-summit/>. November 24. <https://setkab.go.id/en/indonesia-successfully-inserting-the-maritime-cooperation-as-a-priority-in-the-east-asia-summit/>.

Setnas ASEAN-Indonesia. 2018. ASEAN Akan Kembangkan Collective Outlook Konsep Asia Indo-Pasifik. September 7. <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/asean-akan-kembangkan-collective-outlook-konsep-asia-indo-pasifik>.

Setnas ASEAN-Indonesia. 2018. Negara dan Think-Tanks ASEAN Berkomitmen Perkuat Kerja Sama Indo-Pasifik. Maret 21. <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/negara-dan-think-tanks-asean-berkomitmen-perkuat-kerja-sama-indo-pasifik>.

Setnas ASEAN-Indonesia. 2019. AMF ke-9 dan Expanded-AMF ke-7 di Vietnam: Penguatan Kerja Sama Maritim di ASEAN. Desember 9. <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/amf-ke-9-dan-expanded-amf-ke-7-di-vietnam-penguatan-kerja-sama-maritim-di-asean>.

Siahaan, Benny Y.P., interview by Luna Khoirunissa. 2020. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan Indonesia (Februari 25).

Tempo. 2014. Indonesia to Build Military Base in Natuna. September 10. <https://en.tempo.co/read/605767/indonesia-to-build-military-base-in-natuna>.

### **Declaration of Conflict Interest**

The Author declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this article.

### **Biography**

**Luna Khoirunissa** Program Studi Hubungan Internasional, FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur.

**Maria Indira Aryani** Program Studi Hubungan Internasional, FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur